

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980

Nanda Setia ✉

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2022
Disetujui Juni 2023
Dipublikasikan Juli 2023

Keywords:
Amerika Serikat, Indonesia,
Orde Baru, Pembangunan
Ekonomi, Soeharto

Abstrak

Sejak dimulainya kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia yang menandai munculnya keterlibatan Amerika Serikat di Indonesia sangat berpengaruh besar dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia, ditambah lagi adanya peraturan mengenai investasi modal asing di Indonesia. Krisis ekonomi pada periode Orde Lama membuat Soeharto merombak berbagai kebijakan perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi trilogi pembangunan dan REPELITA mulai digagas oleh Soeharto, yang tentunya membutuhkan modal yang amat besar. Demi ketercapaian cita-cita tersebut diwujudkan dengan mendekatnya Indonesia kepada Amerika Serikat. Akibatnya membuat Amerika Serikat memiliki hubungan intim dengan Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1966-1980. Melalui metode penelitian sejarah tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai awal mula terjalannya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, kebijakan ekonomi Indonesia yang mendasari keterlibatan Amerika Serikat, serta kontribusi yang diberikan Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru.

Abstract

Since the start of President Suharto's leadership in Indonesia, which marked the emergence of the involvement of the United States in Indonesia, it has had a great influence in relation to Indonesia's economic development, in addition to the regulations regarding foreign capital investment in Indonesia. The economic crisis during the Old Order period prompted Suharto to revamp various Indonesian economic policies. Suharto's economic policies for the development trilogi and REPELITA were initiated, which of course required a huge amount of capital. In order to achieve these ideals, Indonesia is getting closer to the United States. As a result, the United States has an intimate relationship with Indonesia. This paper aims to explain the involvement of the United States in Indonesia's economic development during the reign of President Suharto 1966-1980. Through the historical research method, this paper will provide an overview of the beginning of Indonesia's relationship with the United States, Indonesia's economic policies that underlie the involvement of the United States, and the contribution made by the United States in Indonesia's economic development during the New Order era.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia dimulai ketika turunya surat perintah dari Presiden Soekarno yang diturunkan pada 11 Maret 1966 yang dikenal dengan SUPERSEMAR. Pada saat itu pula menandai munculnya suatu era baru yang dikenal dengan Orde Baru. Pada era ini terjadi perubahan mengenai politik luar negeri Indonesia yang mana lebih condong ke Barat. Sebelumnya pada era Presiden Soekarno politik luar negeri Indonesia dinilai lebih condong ke Timur seperti RRC, Jepang, Korea, dan Uni Soviet. Sehingga muncul berbagai persepsi bahwasanya Soekarno lebih pro kepada komunisme. Setelah pergantian kepemimpinan hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur mulai renggang akibat dari adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965. Keberhasilan Militer Angkatan Darat Indonesia yang berhasil meng kudeta Indonesia pada tahun 1965 karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis membuat Soeharto yang kala itu berpangkat sebagai Panglima Angkatan Darat mendesak agar Soekarno mengeluarkan surat perintah untuk menjaga keamanan jalanya pemerintahan di Indonesia. Akibat dari adanya surat perintah tersebut diangkatlah Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua pada tahun 1966.

Sistem politik yang diterapkan oleh Soeharto tentulah berbeda dengan politik pada masa Orde Lama. Pada era Soeharto lebih menekankan pada ketahanan nasional mengingat adanya berbagai pemberontakan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa Orde Lama membuat Soeharto melibatkan militer dalam segala kegiatan politiknya. Ketahanan Nasional disini adalah suatu kondisi untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya yaitu masyarakat adil dan makmur. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Nurdin, 1999). Akan tetapi yang lebih ditekankan oleh

Soeharto dalam hal ini adalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Sistem politik luar negeri Indonesia pada era Soeharto lebih menekankan stabilitas politik domestik, politik pertahanan dan keamanan.

Politik bebas aktif Indonesia sendiri diimplementasikan dengan mendekatnya Indonesia kepada negara-negara Barat sehingga dalam hal ini negara Barat termasuk para pengusaha, investor asing, dan perbankan memiliki peran penting dalam membangun Ketahanan Nasional di Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam hubungan politik internasional ini menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran positif bahwasanya Indonesia sejak era Soeharto sudah memiliki hubungan baik dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan keikutsertaan Amerika Serikat dalam membantu Indonesia sebagai upaya membangun Ketahanan Nasionalnya. Penulisan ini mengkaji dari sisi historis keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia sebagai wujud daripada ketahanan nasional. Tulisan ini menjelaskan bagaimana sistem perekonomian Indonesia di masa Orde Baru yang mampu mengundang liberalism ekonomi sehingga Indonesia mulai mendekat pada negara-negara di Barat yakni Amerika Serikat serta bentuk-bentuk bantuan yang diberikan Amerika Serikat dalam membantu membangun perekonomian Indonesia 1966-1980

METODE

Dalam penulisan Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto Tahun 1966-1980 menggunakan metode penelitian sejarah. Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama yakni heuristik dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan sumber dan data-data yang diperoleh untuk mendukung penulisan tersebut. Sumber yang diperoleh terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer didapatkan dari buku kumpulan arsip surat kabar di tahun 90-an karya Mohammad Sadli dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berisi data-data pada masa pemerintahan orde baru serta dari hasil penelitian dari sudut pandang Amerika yakni *American Policy: The Direction of Indonesia during the Period (1967- 1968) in the Light of Documents Regarding the American Ministry of Foreign Affairs* karya Tala1, S. dan Abdel, Y. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan skripsi yang mendukung kepenulisan ini.

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan sumber dilakukanlah kritik atau verifikasi sumber. Sumber-sumber yang sudah didapatkan tadi dilakukan seleksi tentang keterkaitan dengan penulisan yang akan ditulis. Sehingga didapatkan kebenaran dan keadilan daripada penulisan ini. Kemudian setelah melakukan kritik dan menemukan fakta untuk mengungkap topik yang diteliti dilakukanlah interpretasi. Pada tahap interpretasi digunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas yakni politik dan ekonomi. Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu mengungkapkan fakta-fakta sejarah dan analisis hubungan yang ada dari peristiwa yang terjadi. Tahapan selanjutnya yakni historiografi atau penulisan hasil dari interpretasi dan fakta-fakta yang telah diverifikasi tadi dalam bentuk tulisan sehingga menghasilkan tulisan mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia era Soeharto tahun 1966-1980.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Awal Mula Terjalannya Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat

Pergantian pemerintahan dari Soekarno menuju Soeharto tentunya memiliki dinamika politik yang berbeda. Soeharto yang saat itu berhasil mengukudeta Indonesia karena pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965 membuatnya mulai

menjauh dari negara-negara di bagian Timur dan mulai beralih menjalin hubungan politik ke negara-negara Barat. Melalui pendekatan Soeharto kepada negara Barat salah satunya Amerika Serikat diharapkan mereka memberikan bantuan dana. Awalnya Soeharto menilai dari sisi kemampuan militer Amerika Serikat sebelum akhirnya mulai menjalin hubungan politik. Sebagai contohnya dimana kemampuan militer Amerika mampu melindungi Pulau Darwin dari ancaman militer Jepang pada tahun 1942 sehingga membuatnya Australia memilih untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai negara induknya dan bukan lagi Inggris (Sibiro, 2012). Berbagai persaingan baik militer maupun non militer yang selalu identik dimenangkan oleh Amerika Serikat membuat Soeharto memilih jalan untuk lebih mendekatkan diri negeri paman sam ini. Dengan mendekatnya Indonesia kepada Amerika Serikat maka kekuatan militer Indonesia akan dapat diperkuat selain dari sisi ekonominya karena kekuatan militer yang kuat nanti akan berpengaruh terhadap pengendalian ekonomi pemerintahan. Disamping membangun kembali ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis di masa Orde Lama, Soeharto juga menekankan kekuatan militer untuk melegitimasi kekuasaannya.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mulai terlihat ketika Soeharto menciptakan kebijakan baru yakni Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) 1967. Adanya kebijakan UU PMA membuat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat semakin mesra. Puncak hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat yakni pada masa pemerintahan Presiden Richard M. Nixon 1969. Undang-undang PMA disahkan pada tanggal 1 Januari 1967, yang membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap pengusaha dalam negeri maupun pihak swasta asing untuk membangun perusahaan di Indonesia. Indonesia berada dalam kondisi terbuka bagi pemodal asing yang ingin berinvestasi. UU PMA sengaja dibuat karena tindakan inilah yang dirasa paling mudah untuk menggerakkan roda perekonomian yang

berorientasi pada pasar. UU PMA dibuat salah satunya diakibatkan oleh perekonomian Indonesia yang sebelumnya lebih bertumpu pada pendapatan ekspor perminyakan.

PN Pertamina adalah perusahaan yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dan menjadi sumber keuangan utama bagi Indonesia pada akhir 1960-an. Semakin besarnya produksi serta permintaan, pemerintah kala itu menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 1971 yang mana untuk memberikan peluang bagi Pertamina dalam memperluas bisnisnya. Dengan diterbitkan undang-undang tersebut, Pertamina tidak lagi diatur secara hukum oleh Undang-undang tentang Perusahaan Negara. Namun ternyata dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 1971 malah mengakibatkan Pertamina terjerat hutang karena terlalu berambisi dalam memperluas bisnisnya. Hal ini disebabkan karena dalam membangun bisnis di luar perminyakan seperti proyek pembangunan Residential Estate tidak hanya menggunakan laba dari hasil tambang minyak, melainkan bersumber dari dana investasi dan pinjaman dari bank-bank komersial yang menyebabkan Pertamina terlilit oleh hutang (Chaniago, 2021). Keadaan ini tentunya semakin menyulitkan pemerintahan ditambah lagi inflasi Indonesia sendiri yang mencapai 650% pertahun yang membuat pemerintah harus segera menentukan arah kebijakan ekonomi politik serta melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dalam melakukan tindakan tersebut diperlukan suatu modal serta dana yang besar. Hal ini bisa didapatkan dengan berhubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan dalih memulihkan hubungan yang sempat rapuh dengan harapan Amerika Serikat memberikan bantuan dana baik berupa pinjaman, obligasi, maupun investasi.

Bantuan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dapat direalisasikan asalkan pemerintahan Orde Baru merombak kebijakan politik yang sejalan dengan Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh dengan menyelesaikan masalah konfrontasi Malaysia secara damai dan mengaktifkan kembali keikutsertaan Indonesia menjadi anggota organisasi

internasional (Sudarsono dalam Murifah, 2000). UU PMA memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat yang mana Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia sehingga berpotensi dalam pemasaran produk industri dan apabila penduduk Indonesia dipekerjakan tentunya upah gaji yang dibayarkan relatif lebih murah. Selain itu ketersediaan sumber daya alam yang melimpah memberikan keuntungan tersendiri dalam produksinya.

B. Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Mendasari Dimulainya Keterlibatan Amerika Serikat

Sejak pemerintahan Soekarno lengser yang kemudian digantikan oleh Soeharto maka kebijakan perekonomian Indonesia berbuah total, awalnya sosialis parlementer kini lebih kepada liberalis dengan sistem ekonomi Pancasila. Dalam pengimplementasiannya di bidang pembangunan ekonomi pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi dengan konsep Trilogi Pembangunan (1) Pemerataan pembangunan; (2) Pertumbuhan Ekonomi, dan; (3) Stabilitas Nasional. Dalam implementasinya stabilitas nasional digunakan sebagai pengendali pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menarik para investor asing sebagai pemeran utama. Kemudian saat perekonomian mulai tumbuh, kesejahteraan mulai diratakan sebagai wujud pemerintahan yang berkeadilan. Pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menata struktur ekonomi sebelumnya, dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program-program yang digagas oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi yang pada saat itu mencapai angka 650% per tahun pada tahun 1966, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok (Mayrudin, 2018).

Pemerintah Orde Baru juga merencanakan program pembangunan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang mulai dilaksanakan pada 1 April 1969 yang mana terbagi

dalam 6 kebijakan, Perencanaan pembangunan lima tahun bertujuan memberikan fasilitas dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia tetap eksis di dunia internasional serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Konsep REPELITA yang digagas oleh Soeharto, salah satu perwujudan dari REPELITA I (1969-1974) yakni dibangunnya industri substansi impor yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. REPELITA II (1974-1979) yang menitik beratkan pada peningkatan standar mutu masyarakat Indonesia kemudian REPELITA III (1979-1989) menekankan pada perkembangan sektor pertanian untuk mencapai tingkat dari swadaya menjadi swasembada pangan dan pematangan industri yang mengelola bahan mentah. REPELITA IV (1984-1989) yang mana rencana pembangunan ini diharapkan dapat mempertahankan swasembada pangan yang telah direncanakan sekaligus meningkatkan produksi industri yang memproduksi mesin-mesin kebutuhan pangan. REPELITA V (1989-1994) bertujuan meningkatkan pertumbuhan sektor industri yang didukung oleh pertumbuhan dari sektor pertanian sedangkan untuk REPELITA VI (1994-1999) dimana bangsa Indonesia hanya tinggal menikmati hasil dari berbagai rencana pembangunan yang telah digagas sehingga cita-cita untuk mewujudkan negara maju dan sejahtera dapat terlaksana. Namun kebijakan REPELITA hanya berhenti pada tahap keenam saja karena adanya berbagai penyimpangan terjadi pada masa Orde Baru yang membuat Soeharto harus mengakhiri jabatannya selama lebih dari 30 tahun (Sanusi, 2014).

Jalan menuju kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia diwujudkan dalam bentuk REPELITA yang sudah dilaksanakan sampai pada tahap REPELITA VI. Dalam upaya mewujudkan konsep REPELITA I dimana pemerintahan Orde Baru mulai merintis pembangunan industri substansi impor dirasa memiliki keuntungan besar jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia amat padat. Jumlah penduduk ini memungkinkan untuk meningkatkan potensi pasar dengan pendistribusian

barang yang menyeluruh ke setiap pulau di Indonesia, tingkat promosi produk yang berpeluang mendapatkan keuntungan, serta tersedianya tenaga kerja yang cukup. Selain itu kekayaan alam Indonesia menjadi sumber utama ketersediaan bahan mentah bagi industri modern. Kenyataan dalam membangun industri substitusi impor masih diperlukan bahan-bahan dari luar negeri dan memaksakan impor untuk keperluan industri. Amerika Serikat salah satu negara yang paling banyak memberikan impor untuk industri di Indonesia. Pada tahun 1995 dimana impor Indonesia dari Amerika Serikat mencapai 4755,9 US \$ atau sekitar 12% dan meningkat pada tahun 1997 yakni mencapai 5440 US \$ sekitar 13% (Basuki, 2002). Hasil impor Indonesia dari Amerika Serikat paling banyak berupa bahan baku, mesin, dan barang modal. Hal ini tentunya membantu pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Barang-barang impor dari Amerika Serikat memiliki nilai yang cukup tinggi dalam membangun perindustrian di Indonesia terutama industri yang bergerak dalam bidang manufaktur.

Sistem ekonomi Pancasila yang berbentuk liberalisasi mengundang beberapa investor asing untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia juga untuk mencari bantuan dana dari negara barat. Kebijakan ekonomi Pancasila yang mengundang investor asing yakni pembukaan perdagangan internasional, yang bertujuan mencukupi kebutuhan dalam negeri Indonesia yang belum dapat diproduksi sendiri dan agar mampu menekan harga barang kebutuhan masyarakat Indonesia serta membuka peluang bagi Indonesia untuk mengimpor hasil produksinya sendiri. Kemudian untuk mengurangi dampak dari inflasi yang digunakan impor tadi harus menyediakan devisa yang dibutuhkan maka pemerintah kala itu dalam menangani masalah tersebut melakukan utang luar negeri untuk menutupi kekurangan devisa tadi. Kebijakan lain yang menonjol dalam sistem ekonomi Pancasila yakni UU PMA no.1 tahun 1967 yang membuka pintu bagi pemodal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kebijakan UU PMA tidak

hanya berisi mengenai aturan investasi saja melainkan terdapat jaminan dan hak-hak bagi para investor asing. UU PMA dibuat karena pemerintah Orde Baru tidak bisa hanya mengandalkan investor dari dalam negeri saja apalagi kebijakan ekonomi Indonesia adalah trilogi pembangunan yang membutuhkan modal besar dalam ketercapaiannya. Pemerintah Orde Baru terlalu banyak bergantung pada pendapatan hasil ekspor minyak yang pada akhirnya mengalami penurunan yang berakibat pada kerugian di tahun 1981. Investasi asing dapat membantu menutupi ekonomi Indonesia akibat turunya pendapatan minyak dan cara ini lah yang dirasa paling mudah serta memiliki keuntungan yang besar.

C. Kontribusi Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sejarah yang mendasari terlibatnya Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Apalagi hampir seluruh menteri yang bergerak dalam perekonomian dan hubungan internasional Indonesia adalah mantan lulusan University of California, Berkeley yang mana sering dijuluki sebagai “Mafia Berkeley”. Mereka yang pertama menggagas politik ekonomi liberal yang diharapkan mampu merehabilitasi kondisi ekonomi Indonesia setelah terjadinya pergantian presiden. Langkah yang ditempuh dengan memulihkan hubungan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat yang nantinya hubungan ini membawa Amerika Serikat terlibat dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat dibuktikan dengan adanya berbagai kontribusi ekonomi yang diberikan mulai dari bantuan dana sampai pada investasi.

1. Mengalirnya bantuan dana Amerika Serikat untuk Indonesia

Ketika Soeharto menjabat sebagai presiden Indonesia yang kedua pada bulan Maret 1966 arah

kebijakan politik luar negerinya dilakukan untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia akibat krisis yang pernah terjadi pada masa Orde Lama. Berbagai pendekatan dilakukan demi menimbulkan simpati agar negara-negara maju bersedia memberikan dana bantuan kepada Indonesia. Saat terjadi perang Vietnam pada tahun 1967 dimana terjadi intervensi militer Amerika Serikat terhadap Vietnam, Soeharto dalam pidatonya memprioritaskan Vietnam sebagai negara di Asia Tenggara yang perlu di khususkan. Namun tampaknya pengkhususan ini dinilai lebih cenderung memihak kepada Amerika Serikat, padahal pemerintahan Soekarno di masa Orde Lama benar-benar mengutuk Indonesia dalam kaitannya dengan intervensi militer Amerika Serikat. Keterkaitan ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan negara yang dinilai sebagai pemberi bantuan luar negeri yang utama bagi Indonesia, sehingga Soeharto sebagai pimpinan Indonesia kala itu mau tidak mau harus memberikan timbal balik kepada Amerika Serikat lewat intervensi militernya di Vietnam. Dalam pidatonya Soeharto menyatakan bahwasanya

“Kebijakan luar negeri pada masa yang akan datang akan diarahkan untuk memperbaiki hubungan-hubungan internasional Asia-Afrika Termasuk negara non-blok penciptaan stabilitas kawasan dan kerjasama di Asia Tenggara akan mendapat prioritas pertama, sedangkan perhatian khusus akan diberikan terhadap persoalan perang di Vietnam”

Perhatian khusus terhadap persoalan perang di Vietnam yang dilakukan oleh Indonesia atas dasar persamaan pandangan. Kesamaan pandangan terkait ideologi politik, dimana militer Indonesia sendiri yang anti komunis sejalan dengan militer dari Amerika Serikat, ditambah kekhawatiran terhadap pengaruh dari RRC (Leifer, 1989).

Sejak peristiwa itu Amerika Serikat menyatakan kesanggupan dalam membantu merehabilitasi perekonomian Indonesia. Leifer juga menyebutkan bahwasanya semenjak Soeharto resmi menjadi presiden Indonesia yang kedua, Amerika Serikat bersama dengan Jepang lewat IGGI mulai

memberikan bantuan dana sebanyak 200 juta dolar AS yang masing-masing ditanggung sepertiga dari kedua negara tersebut (Mashito, 2013). Bantuan dana ini kemudian meningkat di tahun 1968 menjadi sebanyak 360 juta dolar dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 1969 menjadi 500 juta dolar pada masa pemerintahan presiden Richard M. Nixon. Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat-37 yakni Richard M. Nixon sebagai presiden pertama yang mengunjungi Indonesia dalam masa pemerintahan Soeharto di tahun 1969. Sebagai balasannya Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat yang pada saat itu disepakati bahwa Amerika Serikat akan membantu Indonesia. Sebelumnya pemerintahan Amerika Serikat sudah berusaha menjalin hubungan baik dengan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno, tetapi karena Soekarno yang dinilai lebih mengarah kepada sosialis membuat Amerika Serikat sedikit dihiraukan. Setelah pergantian kepemimpinan dan Soeharto menjadi Presiden RI hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mulai membaik. Hubungan baik inilah yang kemudian menarik Amerika Serikat untuk menambah bantuan dana perekonomian Indonesia, apalagi dengan disahkannya UU PMA pada tahun 1967.

IGGI memberikan bantuan berupa pinjaman modal yang dikembalikan dengan ekspor produksi alam (Murifah, 2000). Kekayaan alam Indonesia sebagian diekspor ke Amerika Serikat sebagai bentuk pengembalian dana. Dalam hal ini ekspor Indonesia juga mengalami peningkatan. Selain itu Suwarsono (1992) menyebutkan total bantuan IGGI kepada Indonesia sebesar 4,75 miliar dolar AS dan 1 miliar yang diantaranya berupa FDA (*fast disbursing assistance*). Berkat dari bantuan yang didapatkan Indonesia mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia salah satunya yakni berkurangnya angka kemiskinan. Selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 1988 perekonomian Indonesia tumbuh sebanyak 7% per tahunnya. Selain itu Indonesia juga dinilai berhasil dalam meningkatkan peran swasta, dalam menunjang pembangunan ekonominya.

2. *Bantuan kebutuhan pangan*

Indonesia mengalami krisis pangan besar di tahun 1960 pada masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintah kala itu lebih memfokuskan pada politik pemerintahan Indonesia dan upaya dekolonisasi serta menasionalisasikan seluruh perusahaan milik kolonial Belanda sehingga kebutuhan akan pangan sangat tergantung pada impor. Impor pangan terbanyak di tahun 1960 adalah impor beras yang mencapai jumlah 0,6 juta ton, impor beras ini terjadi sampai masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini membuat nilai impor terus mengalami kenaikan hingga puncaknya terjadi pada tahun 1980 dengan nilai mencapai 2 juta ton beras. Pada tahun 1967 pada masa pemerintahan presiden Johnson, Amerika Serikat mengirim bantuan beras dengan total sebanyak 100.000 ton beras dan sejumlah kapas dengan 150.000 bal kapas mentah atas permintaan presiden Soeharto dan pinjaman tembakau sebesar 2 juta dolar. Dalam sebuah catatan memorandum Amerika Serikat yang diberikan kepada pemerintah Indonesia pada rapat makan siang, presiden Johnson bersama dengan menternya Rusk, Makniamaria, Walt Russo dan George Kretzan pada tanggal 25 Juli 1967 mengadakan rapat yang membahas tentang bantuan dana untuk Indonesia, menteri Rusk mengatakan bahwasanya Amerika Serikat akan memberikan 200 juta dolar kepada Indonesia dengan sekelompok donor untuk fasilitas dan sarana transportasi dan komunikasi dasar yang dibutuhkan pemerintah Indonesia dan bantuan tersebut akan terus berlanjut. Setahun setelahnya Amerika Serikat memberikan hibah sebanyak 50 juta dolar dalam bentuk beras kepada Indonesia pada tahun 1968 dan sejumlah peralatan. Amerika Serikat memberikan bunga sebanyak 2% dalam jangka waktu hanya 10 tahun saja dan pengembalian pinjaman dolar selama jangka waktu empat puluh tahun (Dawood, dalam Talal & Abdel, 2020).

Impor beras terus berlanjut sampai pada tahun 1980 hingga akhirnya Soeharto merencanakan pembangunan REPELITA III yang berlangsung pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1989 untuk

mulai berswasembada pangan karena Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang berada pada wilayah garis khatulistiwa dimana potensi pertanian amat besar. Hingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sendiri tanpa harus ketergantungan impor kepada Amerika Serikat. Produksi beras Indonesia mencapai 25 juta ton lebih dibandingkan dengan tahun 1968 yang hanya mampu memproduksi sebanyak 11,666 juta ton. Kenaikan yang signifikan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang amat berpotensi dengan wilayahnya yang amat besar sehingga sektor pertanian dapat terus dioptimalkan. Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 memberikan kepercayaan kuat pada rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru, keberhasilan ini semakin menjadi legitimasi kekuasaan rezim Orde Baru kala itu (Sanusi, 2014). Keberhasilan REPELITA III membuat Edouard Saouma selaku direktur jenderal FAO mengundang Soeharto untuk berbicara pada forum organisasi tersebut di Roma, Italia pada tanggal 14 November 1985. Bagaimana tidak keberhasilan ini memberikan peluang bagi Indonesia dengan segala potensinya untuk terbebas dari impor beras Amerika karena jika Indonesia terus menerus meminta bantuan Amerika akan kebutuhan pangan tentunya akan semakin meningkatkan hutang luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat.

3. *Perkembangan Ekspor - Impor antara Indonesia dan Amerika*

Dalam pengembalian pinjaman modal berupa ekspor kepada negara kreditur membuat ekspor Indonesia ke Amerika Serikat semakin meningkat. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebanyak 20,2 % sampai tahun 1983 kemudian mengalami penurunan sebanyak 13,1% di tahun 1991 dan di tahun 1992 ekspor perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat diantaranya rempah-rempah dan berbagai jenis pertanian lainnya (Nurdin, 1999). Pada tahun 1995 dimana Amerika Serikat menduduki urutan keempat sebagai negara tujuan ekspor terbanyak setelah negara-negara ASEAN yakni berjumlah 14%, dari total ekspor sebanyak 40.000

dolar AS. Walaupun sebelumnya ekspor Indonesia yang paling banyak berasal dari sektor migas yakni minyak pada tahun 1973 sampai dengan 1980. Namun karena ekspor minyak mengalami penurunan dan berbagai masalah internal yang dihadapi oleh PN Pertamina sehingga nilai ekspor minyak tidak lagi menjadi prioritas utama di tahun 1995. Selain ekspor Indonesia juga banyak melakukan kegiatan impor kepada Amerika Serikat, diantaranya impor berbagai jenis teknologi seperti mesin, peralatan listrik, mesin-mesin untuk transportasi sehingga pada masa pemerintahan Soeharto di Indonesia sudah sedikit mengenal teknologi. Adanya aktivitas impor permesinan Indonesia mulai merintis program baru yakni Swasembada beras pada tahun 1984 yang membuat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dari Amerika Serikat mengingat wilayah Indonesia sendiri yang sangat cocok untuk melakukan produksi beras sendiri.

Selain itu impor permesinan dari Amerika Serikat juga digunakan untuk bahan pembuatan satelit pertama Indonesia yakni satelit Palapa yang berhasil meluncur pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut diberi nama Palapa A1 yang merupakan buatan dari Hughes Amerika Serikat yang mana dalam peluncurannya juga dilakukan di Amerika Serikat tepatnya di Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat dengan roket Delta bernomor 2941. Sebuah fenomena yang membanggakan dimana pada masa Orde Baru pemerintahan kala itu mampu memberikan perubahan besar dalam bidang teknologi yang mampu menyatukan interaksi lewat media elektronik, segala macam pemberitaan dan alat komunikasi mulai hadir di masa Orde Baru. Keberhasilan ini membuat Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara ketiga di dunia yang mampu mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik GSO setelah Amerika Serikat dan Kanada, yang mana pusat pengendaliannya berada di Stasiun Pengendali Utama di Cibinong, Jawa Barat. Berkat adanya satelit palapa berbagai media informasi mulai dapat dijangkau bahkan sampai ke pelosok desa diantaranya seperti televisi, radio, bahkan sampai alat telekomunikasi (Sanusi, 2014).

4. *Investasi pertama Amerika Serikat di Indonesia*

Sejak adanya kebijakan UU PMA tercatat 22 negara menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 1967-1970. Negara yang menanamkan modal terbesar yakni di urutan pertama Amerika Serikat, Filipina dan Jepang (Rizki, 2013). Tidak dapat dipungkiri bahwasanya investasi asing dari kebijakan ekonomi yang digagas oleh Soeharto membuat status Indonesia yang berpendapatan rendah menjadi naik tingkat sebagai negara dengan pendapatan menengah di tahun 1970. Indonesia bahkan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang mengalami kenaikan rata-rata 7% pertahun. Selain itu Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, pada tahun 1967 PDB Indonesia hanya mencapai 5,6 miliar US \$ di tahun 1996 meningkat menjadi 227 miliar US (Suwarsono, 1992). Amerika Serikat sebagai investor asing pertama yang menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Leo Suryadinata dalam Nurdin (1999) menyebutkan bahwasanya investasi Amerika Serikat melebihi Jepang yakni 21,1 US \$ padahal sebelumnya hanya 1,91 US \$. Investasi Amerika Serikat yang mampu mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi di Indonesia adalah PT Freeport. PT Freeport masuk ke Indonesia pada tahun 1968 dengan menandatangani Kontrak Karya 1 sebagai prasyarat menanamkan investasinya di Indonesia. PT Freeport mendapatkan kontrak selama 30 tahun pada masa pemerintahan Soeharto, padahal sebelumnya Soekarno menolak tegas

SIMPULAN

Pergantian jabatan presiden di masa Orde Lama membuat berbagai perubahan dinamika politik pemerintahan baru yang dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru hadir dengan visi merehabilitasi ekonomi Indonesia yang sempat mengalami krisis dengan konsep ekonomi liberal. Perubahan ini membuat arah pandangan hubungan luar negeri Indonesia berpindah haluan. Di masa Orde Baru hubungan luar negeri Indonesia lebih berpihak pada negara-negara di bagian Timur

investasi asing yang masuk ke Indonesia sedangkan Soeharto memberikan pintu selebar-lebarnya bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. PT Freeport bergerak di bidang tambang emas dan tembaga di Papua dengan total saham sebesar lebih dari 90% lebih.

Adanya PT Freeport milik Amerika Serikat secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada Indonesia melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain itu Indonesia juga mengenal berbagai macam teknologi dan berbagai teknik dalam melakukan riset pertambangan. Tidak dapat dipungkiri, walaupun Indonesia diberikan keuntungan oleh PT Freeport yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia tetapi hal tersebut tidak terlepas dari berbagai sisi negatif. Kekayaan Indonesia menjadi terkuras habis oleh pihak asing, apalagi adanya jaminan bahwasanya setiap perusahaan asing tidak dapat dinasionalkan kecuali dengan alasan tertentu. Indonesia sendiri hanya mendapatkan saham tidak kurang dari 10% padahal jika ditelusuri seharusnya dalam kontrak karya selama 30 tahun (1967-1997) Indonesia harusnya telah menguasai mayoritas saham PT Freeport baik benda, teknologi, maupun SDM. Hal tersebut karena PT Freeport menerapkan aturan proses divestasi sebesar 51% sebagaimana aturan yang telah disepakati bersama yang tentunya ini menjadi sesuatu yang berat sebelah (Sirwanto, 2020)

seperti Cina, Jepang, Rusia, dan lainnya. Namun setelah diduduki oleh Presiden Soeharto arah pandangan luar negeri Indonesia berpihak pada negara Barat dengan dalih peristiwa G30S PKI yang membuat Indonesia menjauh dari negara-negara bagian Timur. Kedekatan ini membuat Amerika Serikat terlibat sebagai donator Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Berbagai bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat diantaranya bantuan dana di era Presiden Nixon pada tahun 1969 kemudian pinjaman dana dari IGGI yang digagas sendiri oleh Amerika Serikat dengan tujuan

memberikan bantuan pinjaman dana khusus untuk Indonesia. Bantuan lainnya yakni berupa bantuan beras sebanyak 10.000 ton, kapas dengan jumlah 150.000 bal, dan tembakau. Ketergantungan impor beras kepada Amerika Serikat membuat Indonesia melakukan swasembada beras mengingat kondisi iklim Indonesia yang tropis. Amerika Serikat memberikan kontribusi dengan mengirimkan berbagai teknologi transportasi dan komunikasi

dasar untuk membantu Indonesia. Kebijakan UU PMA membuat Amerika Serikat melakukan investasi di Indonesia berupa

pertambangan emas di Papua yang dikenal dengan PT Freeport. Adanya PT Freeport milik Amerika Serikat secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada Indonesia melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dampak dari kedekatan Indonesia kepada Amerika secara bertahap mampu memulihkan ekonomi Indonesia hal ini dibuktikan dengan naikan pendapatan Indonesia dengan rata-rata 7% per tahun hingga status Indonesia berubah dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A. (2002). Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Memasuki Afta. In *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* (Vol. 3, Issue 1, p. 79544). <https://doi.org/10.18196/jesp.3.1.1464>
- Chaniago, Andrinof A. (2012). *Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta, LP3ES
- Leifer, M. (1989). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Mashito, B. (2013). Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang). *Perspektif*, 6, 118–123.
- Mayrudin, Y. M. (2018). Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto. *Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, 4(1), 71–90.
- Musrifah, U. T. (2002). Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Bidang Ekonomi dan Politik 1966-1974. Skripsi tidak diterbitkan Universitas Jember: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan.
- Nurdin, B. (1999). Hubungan Indonesia Amerika Serikat Periode Soeharto. *Laporan Penelitian Universitas Negeri Padang*.
- Rizki, M. (2013). Investasi Asing Jepang Di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 230–240.
- Sadli, M. (1982). Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981. Jakarta: Gramedia
- Sanusi, M. (2014). *Kenangan dan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*. Yogyakarta: Saufa
- Sibiro, J. 2012. *Sejarah Australia*. Yogyakarta: Ombak
- Sirwanto. (2020). Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 84–103.
- Suwarsono, S. (1992). Bantuan IGGI dan Defisit Neraca Transaksi Berjalan. *Unisia*, 13(13),

63–68.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss13.art6>

Talal, S., & Abdel, Y. (2020). *American Policy : The Direction of Indonesia during the Period (1967-1968) in the Light of Documents Regarding the American Ministry of Foreign Affairs*. 11(2), 673–689.